

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan tentang alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk rumah dan toko di Kabupaten Sleman dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang kemudian diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman. Adapun prosedur permohonan yang harus dipenuhi oleh pemohon terbagi menjadi dua kategori yaitu Kategori Usaha Mikro Kecil dalam pendaftarannya melalui Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK dan Non Usaha Mikro Kecil dalam pendaftarannya melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR. Pada penelitian ini seluruh responden menggunakan prosedur KRK. Pelaksanaan alih fungsi responden dalam penelitian ini melalui *Online Single Submission*, dimana pemohon mengunggah berkas secara elektronik berupa pernyataan mandiri sesuai dengan KRK yang dikaji oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sehingga dikeluarkannya Surat Ijin lalu dikirimkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan pencoretan atau perubahan sertifikat tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. Kendala yang terjadi pada pemohon dalam penelitian ini disebabkan oleh beberapa

faktor yaitu kendala regulasi, kendala sistem dimana saat ini untuk pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk rumah dan toko sudah berbasis online sehingga yang kemudian berdampak kepada kendala aplikasi.

B. Saran

Bagi pemohon yang ingin melakukan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk rumah dan toko di Kabupaten Sleman harus memenuhi prosedurnya secara lengkap dan disesuaikan dengan rencana tata ruang Kabupaten Sleman sehingga proses perizinannya dapat diurus dengan cepat. Bagi instansi pemerintah terkait agar lebih memperhatikan lagi sistem aplikasi dengan meningkatkan SDM agar tidak terjadi kendala waktu dan pelayanan bagi pemohon. Adanya layanan bantuan atau konsultasi secara *online* atau *offline* dengan memberikan nomor *Customer Service* jika pemohon kesulitan dalam memasukan data ataupun dalam proses pelaksanaanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi Sasono, 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Jakarta* , Rajawali Pers, Yogyakarta.
- I Wayan Suandra, 1991, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Johara T. Jayadinata, 1986, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, Dan Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung.
- John Salindcho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kasmir, 2009, *Kewirausahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Su Ritohardoyo, 2013, *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Supriadi, 2016, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utomo, 1992, *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*, Universitas Lampung Lampung.
- Urip Santoso, 2015, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenamedia Group, Jakarta.

Jurnal dan Online :

- Cimbniaga, *Pengertian Surat Izin Tempat Usaha dan Cara Membuatnya*, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/pengertian-surat-izin-tempat-usaha-dan-cara-membuatnya>
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, 2019, *Alih Fungsi Di Kabupaten Sleman*, <https://pertaru.slemankab.go.id/3600/alih-fungsi-di-kabupaten-sleman-pada-tahun-2018/>
- Eka Fitriyaningsih, 2017, *Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian dikecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*, Universitas Hasanuddin Makasar.
- Hilda Nurul Hidayati, 2013, “*Konversi Lahan Pertanian dan Sikap Petani di Desa Cihideung Ilir Husnul Khatimah*, Kajian Kesesuaian Pembangunan Ruko Terhadap Kebutuhan Pasar di Kota Mataram, Nomor 3 Vol 9, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/6539> Kabupaten Bogor,” Departmen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/usaha>
- Ludiyanta, 2019, *Quo Vadis Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sleman*, <https://bappeda.slemankab.go.id/quo-vadis-alih-fungsi-lahan-pertanian-di-kabupaten-sleman.slm>
- Muchlisin Riadi, 2020, *Lokasi Usaha*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/12/lokasi-usaha.html>
- Pemerintah Kabupaten Sleman, 2023, *Letak dan Luas Wilayah*, <https://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah/>
- Pemerintah Kabupaten Sleman, 2023, *Profil Kapanewo Ngaglik*, <https://ngaglik.slemankab.go.id>
- Priyono, 2011, *Alih Fungsi Lahan Pertanian Merupakan Suatu Kebutuhan Atau Tantangan*, Fakultas Pertanian UNISRI, Jakarta.
- Timenine, 2015, *Alih Fungsi Lahan Pertanian*, <https://agribisnis14.wordpress.com/2015/03/03/alih-fungsi-lahan-pertanian/>
- Totok Dwinur Haryanto P, 2009, *Model Penatagunaan Tanah Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1960*
- Vallida Anita Pieter, 2015, *Hak Penguasaan Atas Tanah*, Universitas Pattimura.

Daftar Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tempat Tinggal.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 180/ PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Medesak Atas Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertnahan Nasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2021 – 2041.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.